

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Eksistensi Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko memiliki peran signifikan sebagai alat kontrol sosial yang efektif dalam masyarakat. Penjara ini berfungsi untuk mengawasi dan mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma dan aturan adat yang berlaku. Dengan adanya Penjara Nagari, masyarakat menjadi lebih berhati-hati dalam bertindak karena takut akan sanksi sosial yang berat, termasuk dikurung dan dipertontonkan di depan umum. Keberadaan Penjara Nagari telah membawa perubahan positif, terutama dalam mengurangi tindakan asusila seperti perzinaan dan pelanggaran norma adat lainnya. Penjara ini membuat masyarakat lebih patuh terhadap aturan dan menghindari perilaku menyimpang karena rasa malu dan efek jera yang ditimbulkan. Dari 3 kasus yang terjadi sejak pendirian Penjara Nagari pada 2012, terlihat bahwa tindakan asusila telah menurun drastis, dengan kasus terakhir terjadi pada 2015.
2. Implementasi Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang efektif sekaligus bentuk hukuman bagi pelaku asusila. Penjara ini berperan penting dalam menjaga perilaku masyarakat agar sesuai dengan norma adat dan agama, dengan memberikan efek pencegahan yang kuat terhadap pelanggaran seperti zina dan kenakalan remaja. Masyarakat takut melakukan pelanggaran karena sanksi yang diberikan bersifat tegas dan dipertontonkan secara publik, sehingga tindakan asusila dan pelanggaran adat lainnya semakin berkurang. Selain

berfungsi sebagai kontrol sosial, Penjara Nagari juga berperan sebagai tempat hukuman, di mana pelaku pelanggaran diarak keliling kampung dan dipenjara agar dipertontonkan kepada masyarakat, menciptakan rasa malu yang mendalam serta memberikan efek jera. Hukuman yang diberikan tidak hanya berupa kurungan fisik, tetapi juga sanksi sosial dan rasa malu yang bisa bertahan seumur hidup. Kehadiran Penjara Nagari, yang tidak memandang bulu dalam menegakkan aturan, baik kepada masyarakat biasa maupun tokoh adat, telah membawa dampak positif dalam menurunkan angka pelanggaran asusila dan memperkuat ketertiban serta keamanan di Nagari Tigo Jangko.

## **B. Saran**

1. Dalam rangka memperkuat implementasi Penjara Nagari di Nagari Tigo Jangko agar lebih terstruktur dan sejalan dengan sistem hukum nasional, beberapa saran dapat diusulkan. Pertama, diperlukan adanya penguatan dasar hukum yang jelas untuk Penjara Nagari dengan mengacu pada aturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang dan hukum adat yang diakui dalam sistem hukum nasional. Ini penting untuk menghindari potensi konflik hukum dan memastikan bahwa penerapan Penjara Nagari tetap dalam kerangka negara hukum Indonesia.
2. Mekanisme pelaksanaan Penjara Nagari perlu disempurnakan. Mekanisme yang jelas terkait proses penahanan, waktu penahanan, hingga keputusan sanksi perlu disusun dengan prosedur yang baku dan transparan. Hal ini bisa melibatkan struktur adat, tokoh masyarakat, pemuda, serta pemerintah nagari. Penting juga untuk menetapkan batasan wewenang antara hukum adat dan hukum pidana

nasional agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penanganan kasus-kasus yang lebih serius.

3. Peninjauan dan penyesuaian terhadap pelanggaran yang masuk dalam yurisdiksi Penjara Nagari juga diperlukan agar lebih sesuai dengan konteks perkembangan zaman, tanpa mengabaikan nilai-nilai adat yang ada. Kasus-kasus asusila, kenakalan remaja, dan pelanggaran adat lainnya tetap bisa ditangani di bawah hukum adat, namun perlu ada pengawasan agar proses hukum adat tersebut sejalan dengan prinsip hak asasi manusia yang diatur dalam hukum nasional.

